

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sejak otonomi daerah diberlakukan 1 Januari 2001 setiap daerah diharuskan mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, yang dimaksud Daerah Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan daerah tentunya memerlukan dana yang sangat besar dan mencukupi, tentunya dana tersebut harus bersumber dari penerimaan daerah, salah satunya yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. (Fathiyah, Mufidah, Masnun, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pada pasal 1 angka 10, Pajak Daerah dapat didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau badan tertentu kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin. Pemerintah daerah bertanggung jawab langsung dalam mengumpulkan pajak daerah ini dan menggunakan dana yang terkumpul untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak penerangan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak burung wallet, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, serta BPHTB. (Halim,Bawono, dan Dara, 2016).

Salah satu sektor pendapatan terbesar pajak daerah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang digunakan dijalanan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

besar yang bisa bergerak. (Karina dan Budiarmo, 2016).

Dalam situasi saat ini, transportasi menjadi lebih mudah diakses dengan adanya kendaraan bermotor yang tersedia secara luas. Hal ini menyebabkan perubahan preferensi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, yang pada gilirannya memicu seringnya perpindahan kepemilikan kendaraan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberlakukan untuk mengatasi hal tersebut. BBNKB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan atau penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian antara dua pihak, tindakan sepihak, atau situasi yang timbul akibat transaksi jual beli, pertukaran, hibah, warisan, dan/atau pengalihan kepemilikan ke dalam entitas bisnis. (Samudra, 2015).

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan itu semua jenis bahan bakar cair atau gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. (Septiana Widya Ningsih, 2018).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) awalnya merupakan opsen atas penjualan bensin yang dianggap sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun, kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun semakin meningkat.

(Samudra,2015).

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tersebut dipengaruhi oleh kelonggaran dalam pembelian kendaraan bermotor mengakibatkan perilaku konsumtif dari masyarakat makin bertambah banyak, hal tersebut tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa kendaraan bermotr di indonesia khususnya daerah provinsi Jawa Tengah mengalami pertambahan disetiap tahunnya, berikut data kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2019	1.231.026	37.238	563.605	15.627.624	17.459.509
2020	1.309.343	37.785	580.411	16.214.173	18.141.696
2021	1.711.112	44.160	647.811	17.917.660	20.320.743

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel diatas bisa dilihat jumlah kendaraan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 17.459.509unit kendaraan bermotor, kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 18.141.696 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 naik lagi sebanyak 20.320.743 unit. Maka dapat disimpulkan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pembiayaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami peningkatan tentu sumber pendapatan yang berasal dari PAD harus meningkat, karena daerah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah perlu

menerapkan efektifitas untuk meningkatkan pajak daerah, sehingga semua potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berikut tabel yang menjelaskan perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD tahun 2018-2022:

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Perode 2018-2022

Tahun	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase capaian(%)
2018	10.844.887.010.000	11.658.922.480.156	107,51
2019	11.716.924.024.000	12.112.514.167.242	103,38
2020	13.608.945.135.000	11.201.879.201.249	82,31
2021	12.767.083.848.000	11.836.957.240.363	92,71
2022	14.119.794.148.000	13.666.821.708.983	96,79

Sumber : Realtime PAD online Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 realisasinya mencapai target, yaitu 107,51% begitu juga pada tahun 2019, capaiannya Pendapatan Asli Daerah mencapai 103.38% walaupun tahun 2019 mengalami penurunan tetapi masih memenuhi target, ada pula pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pendapatan Asli (PAD) tidak mencapai target yaitu 82,31% .“Karena pandemic Covid-19. Penurunan pendapatan terbesar itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. Yang mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1,9 triliun itu kira-kira hamper 12,5 persen,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kunjungannya di Kota Magelang Kamis (16/07/2020)(*GEGARA COVID 19, PAD JATENG TURUN Rp.1,9 TRILYUN – BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah – [Http://Bappeda.Jatengprov.Go.Id](http://Bappeda.Jatengprov.Go.Id), n.d.*), kemudian tahun 2021 realisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target yaitu 92,71% tetapi mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, ditahun 2022 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 96,79% belum mencapai target yang ditentukan walaupun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Tidak tercapai

target realisasi penerimaan Pendapata Asli Daerah (PAD) dalam 3 tahun terakhir mengindikasikan bahwa ada masalah pada penerimaan dari pajak daerah disektor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menyebabkan berkurangnya pula total peningkatan PAD provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya,

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penelitian dari Desty Rinika (2019) hasil dari penelitian tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotr dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Medan Utara, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Medan Utara. Menurut penelitian Resti Elka Nugrahwati, Pan Budi Mawoto, Hendarti Tri Setyo Mulyani tahun (2019) tentang Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas mengingat pentingnya ketiga sektor permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penerlitan ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan literature tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui apakah ada pengaruh peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu

sumber informasi atau pengetahuan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian selain untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup lima bab dan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Terdapat empat sub bab pada pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang memiliki kaitan dengan pembahasan pada penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah. Teori yang digunakan bersumber dari hasil penelitian

yang signifikan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang definisi operasional variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek yang diteliti, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari pembahasan yang diteliti.